

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintah Daerah” membuktikan bahwa pemerintah serius dalam menjalankan otonomi daerah yang kemudian menjadikan peluang tersendiri bagi setiap daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya masing-masing. Hal ini diperkuat juga dengan dukungan undang-undang yang mengatur urusan pemerintahan daerah tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan kewenangannya melalui asas desentralisasi dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, berdasarkan potensi dan kearifan lokal yang khas dari setiap daerah. Keseriusan Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional demi terciptanya keseimbangan dan keserasian antara laju pembangunan daerah dengan laju pembangunan kota maupun desa, namun kenyataannya dalam pelaksanaan pembangunan saat ini masih belum sesuai harapan karena masih terdapat ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Hal ini terlihat dari adanya ketidakmerataan pembangunan antara pusat dan daerah, yang kemudian akan berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik Nasional menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan yang ada di daerah perkotaan dan perdesaan di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. 1.
Rincian Persentase Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Pedesaan	Total	Perkotaan	Pedesaan	Total
Sumatra	2 098,80	3 820,50	5 919,31	8,43	11,56	10,21
Jawa	6 556,84	6 633,37	13 190,22	6,71	12,70	8,79
Kalimantan	329,10	644,07	973,17	4,29	7,48	5,98
Sulawesi	438,05	1 587,11	2 025,15	5,64	13,50	10,37
Bali dan Nusa Tenggara	587,63	1 450,44	2 038,07	8,93	17,81	13,84
Maluku dan Papua	120,85	1 407,81	1 528,66	4,95	28,98	20,98
Indonesia	10 131,28	15 543,31	25 543,31	6,89	13,10	9,66

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2018

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 20,94%, sementara itu persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,98 persen. Data table 1.1 juga menunjukkan bahwa, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (13,19 juta orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,97 juta orang). Pulau Jawa menjadi pulau dengan jumlah penduduk miskin yang tertinggi dikarenakan jumlah penduduk di Pulau Jawa adalah yang terbanyak dari pulau lainnya, sehingga tidak mengherankan apabila Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk miskin yang paling

banyak. Tabel 1.1. selanjutnya menunjukkan bahwa dari persentase dan jumlah penduduk miskin di setiap pulau, data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi antara kota dan desa berada di wilayah pedesaan, sehubungan dengan permasalahan tersebut, salah satu strategi pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan tersebut yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan desa.

Pembangunan desa sangatlah penting dan vital dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah secara menyeluruh, karena dalam penyelenggaraannya terkandung unsur pemerataan pembangunan yang kemudian hasilnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di desa, maka dari itu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa perlu upaya nyata dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan di era desentralisasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 22 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 salah satu penugasan dari pemerintah dan pemerintah daerah adalah pelaksanaan pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwasanya Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala

Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, dengan dibantu oleh staf-staf desa yang mempunyai kewenangan, tugas serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Pemerintah Desa, dalam kaitannya dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa membutuhkan anggaran yang bersumber dari pendapatan desa, salah satunya yakni dana desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Anggaran yang bersumber dari Dana Desa tersebut akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya pengelolaan dana desa yang baik dimana pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel diharapkan akan menghasilkan kegiatan otonomi desa, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan pengelolaan Dana Desa selain melibatkan masyarakat sebagai subyek maupun obyek dalam pembangunan maupun pemberdayaan, juga turut melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Bendahara Desa selaku pemegang otoritas yang sah dibawah Undang-Undang

Desa. Oleh karena itu *stakeholders* tersebut diharapkan dapat bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Data dari BPS pada tahun 2018, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Jawa Tengah mencapai sebanyak 34,257,900 jiwa atau sekitar 13,1% dari penduduk Indonesia atau terbanyak ketiga setelah Jawa barat yang memiliki 48,037,600 penduduk dan Jawa Timur yang memiliki 39,29,000 jumlah penduduk. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan penyumbang terbanyak jumlah penduduk di Indonesia. Dalam hal kemiskinan, Jawa Tengah termasuk provinsi dengan penyumbang penduduk miskin terbanyak di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dibuktikan melalui data yang dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1. 2.
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa 2017-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
Maret 2017	4 168,44	4 450,72	4 617,01	8,71	13,01	11,17
September 2017	3 774,41	4 197,49	4 405,27	7,83	12,23	11,20
Maret 2018	3 615,79	3 897,20	4 332,59	7,45	11,32	10,98
September 2018	3 539,40	3 867,42	4 292,15	7,25	11,19	10,85

Sumber : Data Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS)

Data tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat persentase kemiskinan tertinggi sebanyak 11,19% dibanding dengan Jawa Barat dan Jawa Timur, padahal jumlah penduduk di Jawa Tengah merupakan yang

terkecil dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, disisi lain, Provinsi Jawa Tengah juga telah mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan dari 2017 - 2018, hal ini diketahui dari rincian jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun 2017 hingga tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 1. 3.
Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah dan Indonesia
Tahun 2017-2018

Tahun	Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah		Penduduk Miskin di Indonesia	
	Jumlah (ribu orang)	Persentase	Jumlah (ribu orang)	Persentase
Maret 2017	4 450,72	13,01	27 771,22	10,64
September 2017	4 197,49	12,23	26 582,99	10,12
Maret 2018	3 897,20	11,32	25 949,80	9,82
September 2018	3 867,42	11,19	25 674,58	9,66

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 1.3. menunjukkan terkait jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2018 sebesar 3867,42 ribu orang (11,19%). Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2018, maka selama enam bulan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 2,978 ribu orang, sementara apabila dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya, maka selama enam bulan, jumlah penduduk miskin pada September 2017 mengalami penurunan sebanyak 25,323 ribu orang. Penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun merupakan trend positif di Indonesia, meskipun penurunan kemiskinan di

Jawa Tengah selalu mengalami penurunan dari tahun 2017 - 2018 namun kenyataannya masih ada beberapa kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami kenaikan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang terdapat pada Provinsi Jawa Tengah seluruhnya belum dapat dikatakan optimal. Berikut ini jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota se Jawa Tengah :

Tabel 1. 4.
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2016/2018

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2016	2017	2018
Kabupaten Cilacap	240.20	238.30	193.20
Kabupaten Banyumas	283.90	283.20	226.20
Kabupaten Purbalingga	171.80	171.90	144.20
Kabupaten Banjarnegara	158.20	156.80	141.70
Kabupaten Kebumen	235.90	233.40	208.70
Kabupaten Purworejo	99.10	98.60	83.50
Kabupaten Wonosobo	160.10	159.20	138.30
Kabupaten Magelang	158.90	157.20	143.40
Kabupaten Boyolali	117	116.40	98.20
Kabupaten Klaten	168	165	151.70
Kabupaten Sukoharjo	78.90	76.70	65.40
Kabupaten Wonogiri	124.80	123	102.80
Kabupaten Sragen	126.80	124	116.40
Kabupaten Grobogan	184.10	181	168.70
Kabupaten Blora	113.90	111.90	102.50
Kabupaten Rembang	115.50	115.20	97.40
Kabupaten Pati	144.20	141.70	123.90
Kabupaten Kudus	64.20	64.40	60
Kabupaten Jepara	100.30	99	85.50
Kabupaten Demak	158.80	152.60	144.10
Kabupaten Semarang	80.70	79.70	75.70
Kabupaten Temanggung	87.10	86.80	75.40
Kabupaten Kendal	107.80	106.10	94.70
Kabupaten Batang	82.60	81.50	66.10
Kabupaten Pekalongan	113.30	111.60	89.50
Kabupaten Pemasang	227.10	225	208.30
Kabupaten Tegal	144.20	141.80	114.10
Kabupaten Brebes	348	343.50	309.20
Kota Magelang	10.60	10.60	9.60
Kota Surakarta	55.90	54.90	47
Kota Semarang	83.60	80.90	73.60
Kota Pekalongan	23.60	22.50	20.50
Kota Tegal	20.30	20.10	19.40

Sumber: Data Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa data jumlah penduduk miskin di seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dimana, dari 35 Kabupaten/Kota terdapat 33 Kabupaten setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, dan hanya dua kabupaten, yakni Kabupaten Kudus yang mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 20 ribu jiwa dari tahun 2016 hingga tahun 2017 dan Kabupaten Magelang yang pada tahun 2016 hingga tahun 2017 jumlah penduduk miskin masih tetap sama sebesar 1,060 ribu jiwa. Data tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan yang ada di wilayah Jawa Tengah masih belum maksimal.

Kabupaten Wonogiri yang merupakan satu dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah juga telah mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, di lain sisi dari sekian kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri termasuk kabupaten yang mendapatkan anugerah indeks daya saing daerah tingkat Provinsi dengan predikat juara pertama pada tahun 2019 se Jawa Tengah, hal ini menegaskan bahwa Wonogiri termasuk kabupaten yang berprestasi dalam hal inovasi maupun IPTEK, di lain sisi dalam hal kemiskinan Kabupaten Wonogiri juga mengalami penurunan tingkat kemiskinan setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dari tabel jumlah dan persentase penduduk miskin se Kabupaten Wonogiri berikut ini :

Tabel 1. 5.
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2018

Tahun	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)
2016	13.12 %
2017	12.90 %
2018	10.75 %

Sumber : olahan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri 2018

Data jumlah penduduk dan persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2016 hingga Tahun 2018 telah mengalami penurunan. Tahun 2016 persentase kemiskinan di Kabupaten Wonogiri mencapai (13.12%), kemudian pada tahun 2017 terjadi penurunan persentase kemiskinan mencapai (12.90%). Tahun 2018 terjadi penurunan kemiskinan kembali sebesar (10,75%). Penurunan angka kemiskinan secara signifikan tersebut dapat mengindikasikan bahwa program pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri telah berhasil dilaksanakan.

Kabupaten Wonogiri, dalam rangka pelaksanaan pembangunan, seperti halnya daerah lain di Indonesia, diberi dorongan oleh pemerintah dalam bentuk Dana Desa yang diberikan kepada masing masing desa. Penggunaan Dana Desa tersebut diperuntukkan untuk membiayai berbagai bidang kegiatanm antara lain kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Salah satu kegunaan dari dana desa yang saat ini gencar ditekankan adalah penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu diperlukan pengelolaan yang baik dari pemerintah desa, agar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran diberikannya Dana Desa khususnya

berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menurut Anwas (Dr. Oos M. anwas, 2013) dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, mengartikan pemberdayaan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dewasa ini mejadi suatu kegiatan yang sangat penting bagi seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, mengingat Provinsi Jawa Tengah saat ini menjadi provinsi yang gencar menerapkan pemberdayaan masyarakat begitu juga di Kabupaten Wonogiri.

Kabupaten Wonogiri secara administratif terbagi menjadi 25 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Nguntoronadi yang merupakan daerah terbesar ke 10 dengan luas daerah mencapai 8040.52 ha, serta memiliki potensi sawah dan waduk yang seharusnya mampu dikembangkan secara maksimal. Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Nguntoronadi terdiri dari 9 desa dan dua kelurahan dengan penduduk berjumlah 23.022 jiwa. Kecamatan Nguntoronadi sebagai kecamatan terbesar nomor 10 di Kabupaten Wonogiri, masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan data keluarga penerima manfaat (KPM) terdapat 1.225 penduduk miskin penerima bantuan se Kecamatan Nguntoronadi yang diperoleh melalui program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 6.
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Pendapatan Dana Desa
Kecamatan Nguntoronadi Tahun Anggaran 2019

No	Nama Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Pendapatan Dana Desa
1	Bulurejo	124	825.403.000
2	Kulurejo	140	849.486.000
3	Semin	107	885.370.000
4	Wonoharjo	108	807.398.000
5	Bumiharjo	90	839.045.000
6	Gebang	135	840.116.000
7	Pondoksari	89	817.449.000
8	Ngadiroyo	100	841.958.000
9	Ngadipiro	139	889.483.000
10	Kel. Kedungrejo	86	-
11	Kel. Beji	110	-

Sumber : Olahan Data Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2018

Tabel 1.6. menunjukkan bahwa, jumlah penduduk miskin terbanyak dilihat dari jumlah keluarga penerima manfaat (KPM), terdapat di Desa Kulurejo dengan jumlah 140 penerima, kemudian Dana Desa yang diberikan kepada Desa Kulurejo sebesar Rp 849.486.000,00 dimana jumlah tersebut merupakan jumlah Dana Desa terbesar ketiga yang dialokasikan ke setiap desa yang terdapat di Kecamatan Nguntoronadi. Desa Kulurejo, meskipun mendapatkan Dana Desa terbesar ketiga di Kecamatan Nguntoronadi, tetap memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi se-Kecamatan Nguntoronadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis berkaitan dengan bagaimana pengelolaan dana desa tersebut terutama peruntukannya bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kulurejo.

Data pencapaian peningkatan kesejahteraan, hasil pelatihan dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Kulurejo selanjutnya juga diketahui belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya dua sub kegiatan saja pada bidang pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai pemerintah Desa Kulurejo pada Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat masih jarang dilaksanakan oleh pemerintah desa pada setiap tahun anggaran sebagaimana hasil penelitian dari Monica dkk yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Walewangko Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, padahal dalam peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwasanya dalam bidang pemberdayaan masyarakat setidaknya harus mencakup 7 sub kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2019, sub kegiatan tersebut antara lain:

1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
2. Sub Bidang Pertanian dan peternakan
3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Data laporan realisasi penyerapan dana desa tahap pertama hingga tahap ketiga menunjukkan, kegiatan-kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat

Desa Kulurejo mencakup dua sub bidang yang terdiri dari berbagai kegiatan yang ditunjukkan pada tabel 1.7 sebagai berikut:

Tabel 1.7
Hasil Pelatihan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kulurejo

No	Sasaran	Target Anggaran	Realisasi	Hasil	target (%)
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000	17.400.000	Terbayarnya biaya penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota BPD sejumlah 2 orang dan Klinik Siskeudes	87 %
2	Penyelenggaraan Posyandu dan Posbindu	10.000.000	7.125.750	Tersedianya pengadaan makanan tambahan - Stunting	71 %
3	Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB)	500.000	500.000	Terbangunnya bina keluarga balita (BKB)	100 %
4	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	30.000.000	30.000.000	-	100 %
5	Penyelenggaraan Pos kesehatan desa	5.400.000	5.400.000	Terbayarnya insentif kader posyandu	100 %

Sumber : Pemerintah Desa Kulurejo Tahun 2019

Tabel 1.7 menunjukkan bahwa hanya ada 5 kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh pihak pemerintah desa Kulurejo, yaitu peningkatan kapasitas aparatur desa, Penyelenggaraan Posyandu dan Posbindu, Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB), Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar serta Penyelenggaraan Pos kesehatan desa.

Hanya terdapat dua sub kegiatan saja yang dicapai pemerintah desa dan hal tersebut diduga karena dalam proses pemberdayaan masyarakat masih terdapat beberapa hal yang kurang optimal dimana menurut Wilson (dalam Nyoman S., 2005:130) menyatakan ada 4 tahap proses pemberdayaan yaitu tahap *awakening, understanding, dan harnessing* yang apabila keempatnya dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang tidak maksimal dapat mempengaruhi penyusunan kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa karena ketika masyarakat tidak diberdayakan dengan baik maka, pemerintah desa tidak akan dapat memahami dengan baik apa yang dibutuhkan masyarakat dan kegiatan yang mendukung apa yang dibutuhkan warga tersebut.

Keseluruhan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kulurejo lebih lanjut, hanya menghabiskan dana sebesar Rp 60.425.750 atau 7% dari total dana yang diterima, dan hal ini sangat sedikit dibandingkan dengan persentase yang seharusnya dilaksanakan dan dihibau oleh Kemendagri dimana dana untuk Pemberdayaan masyarakat seharusnya sebesar 30% (Okezonews.com,2018). Desa Kulurejo juga merupakan desa yang mempunyai lahan pertanian cukup luas, hal ini diketahui dari luas lahan persawahan yang mencapai 1.488.00 ha, sedangkan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, oleh karena itu seharusnya dengan potensi yang dimiliki Desa Kulurejo, pemerintah desa harusnya lebih mampu memberdayakan masyarakat terutama terkait potensi di sektor pertanian, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Gambar 1. 1.
Lahan Pertanian Desa Kulurejo



Sumber : Pengambilan Gambar Pada 8 Oktober 2018

Kondisi pemberdayaan masyarakat di Desa Kulurejo yang masih kurang mendapat perhatian dengan masih sedikitnya persentase dana desa yang diperuntukan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan masih adanya kegiatan pemberdayaan yang belum mencapai 100% pada realisasinya menarik minat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Kulurejo sebenarnya dan factor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut, sehingga dalam penelitian ini perlu dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Desa Kulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka penulis merumuskan apa yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Kulurejo?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Kulurejo ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan Menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Kulurejo.
2. Mengidentifikasi Faktor Pendorong dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Kulurejo

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam mengembangkan teori-teori ilmu pada Ilmu Sosial dan politik secara umum dan berguna bagi pengembangan serta penalaran pada bidang manajemen publik, khususnya terhadap pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di sebuah desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu wadah dalam penerapan ilmu pengetahuan yang sudah didapat oleh penulis selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah.

b. Bagi Universitas

Menambah literatur dan informasi sebagai bahan rujukan bagi penelitian yang selanjutnya berkaitan dengan dalam pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di sebuah desa.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah setempat dalam memecahkan masalah kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di sebuah desa.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah setempat dalam memecahkan masalah kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di sebuah desa.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Pengarang	Artikel/Judul	Temuan	Perbedaan
Kamaluddin Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol III, No 1 (2016)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima	<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat sangat aktif dalam pertemuan/rapat, partisipasi masyarakat dalam mengajukan usulan ketika rapat berlangsung, maupun partisipasi masyarakat dalam mengusulkan program.2. Masyarakat turut ikutserta dalam pengambilan keputusan tersebut3. Partisipasi masyarakat yang berwujud dalam memberikan sumbangan tenaga, sumbangan material/uang, sumbangan pemikiran, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan jadwal kerja bhakti sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka hasil yang diperoleh menjawab sudah aktif.	Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian penulis berkaitan dengan tahap pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan dana desadimana kegiatan pemberdayaan di Desa Kulurejo yang hanya satu kegiatan pemberdayaan yakni peningkatan kapasitas aparatur desa.
Zumaroh	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat	Pemberdayaan yang saat ini tidak mencapai 30% dari anggaran dana desa dapat menciptakan kemandirian masyarakat yang masif.	Penelitian milik Zumaroh memakai pendekatan penelitian sosio-empiris dan evaluasi program sedangkan penelitian milik penulis menggunakan pendekatan

Pengarang	Artikel/Judul	Temuan	Perbedaan
<p>Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan LPPM Intitut Agama Islam Negeri Curup Vol. 4, No 1, (2019)</p>		<p>Namun, hingga saat ini kemandirian masyarakat tersebut belum terwujud secara maksimal. dengan menggunakan pendekatan penelitian sosio-empiris dan evaluasi program, diharapkan penelitian ini dapat memperoleh gambaran nyata tentang efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Lampung Barat. Program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan pemerintah melalui pengelolaan dana desa di Lampung Barat masih belum efektif pelaksanaannya.</p> <p>Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, yaitu: tingkat kesulitan geografis Pekon yang berada pada wilayah pegunungan, serta tingkat pendidikan masyarakat dan aparatur Pekon yang masih relatif rendah. Faktor penyebab tersebut menjadikan pemberdayaan apabila dilihat dari segi program yang ditawarkan sudah sangat baik. Namun masih belum efektif pelaksanaannya dimana aparatur pengelola dana desa kurang berani</p>	<p>kualitatif deskriptif untuk mencari gambaran pemberdayaan masyarakat yang terjadi melalui dana desa dan menganalisis tahapannya.</p>

Pengarang	Artikel/Judul	Temuan	Perbedaan
		mengembangkan program dengan alasan belum ada petunjuk teknis resmi dari pemerintah daerah.	
Dinda Nurhanifa, Afrizal Tjoetra, Ikhsan Jurnal Public Policy, Vol 5. No.2, 2019	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dana Desa: Sebuah Kebijakan Pemerintah Aceh Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Dana Desa di Kecamatan Johan Pahlawan terutama pada Gampong Leuhan, Gampong Padang Seurahet, dan Gampong Blang Beurandang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 27 Tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan terlaksananya 2 (dua) indikator kebijakan, yaitu penyaluran dana bantuan pemberdayaan dari perangkat gampong kepada masyarakat sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan, serta sumber daya manusia dan anggarannya sudah memadai sehingga respon dari masyarakat sangat antusias terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana desa. Namun didalam	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada indikator yang digunakan. Penelitian ini menggunakan 2 indikator yaitu penyaluran dana dan tujuan dari kebijakan tersebut, sedangkan penelitian penulis menggunakan indikator tahapan pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui pelaksanaannya.

Pengarang	Artikel/Judul	Temuan	Perbedaan
		<p>pelaksanaan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 27 Tahun 2017 masih terdapat 4 (empat) kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat gampong kurang memahami terhadap standar, tujuan dan mekanisme serta kurangnya komunikasi dan koordinasi antara agen pelaksana pemberdayaan ekonomi pada tahun 2017 dengan pemerintahan gampong yang sekarang, kemudian pembinaan dan pengawasan yang tidak dilakukan secara menyeluruh oleh pelaksana dan proses verifikasi tidak maksimal</p>	
<p>Monica Meiva Rorong, Arie Junus Rorong, Very Y. Londa</p> <p>Jurnal Administrasi Publik Unsrat, Vol 4 No 53 (2018)</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Walewangko Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat kecil atau kurang mampu. kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Walewangko masih terbatas atau masih mencapai</p>	<p>Penelitian ini menggunakan dimensi pemberdayaan masyarakat dalam menganalisis pemberdayaan melalui dana desa. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada indikator yang digunakan. Dimana penelitian ini menggunakan indikator dimensi pemberdayaan masyarakat sedangkan penelitian milik penulis melihat dari segi tahap pemberdayaan masyarakatnya.</p>

Pengarang	Artikel/Judul	Temuan	Perbedaan
		sebagian kecil masyarakat	
Rumasari Hadi Sumarto, Lukas Dwiantara Jurnal Publicuho, Vol 2 No 2 (2019)	Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penggunaan Dana Desa sangat penting untuk mencegah aliran urbanisasi. Kesempatan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan standar hidup yang terakomodir melalui pemberdayaan masyarakat dari Dana Desa	Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam jurnal tersebut dianggap penting, perbedaan dengan penelitian milik penulis adalah dalam penelitian ini tidak terlalu menyoroti pemberdayaan masyarakat yang terjadi melainkan fokus pada bagaimana dana desa tersebut digunakan sedangkan penelitian milik penulis berfokus pada tahap pemberdayaan masyarakatnya
Tjilen, Alexender Phuck, Samel, W.R, Fenty, Y.M International Journal of Mechanical Engineering and technology (IJMET), Vol 10, Issue 01 (2019)	Local Community Empowerment Implementation of Village Fund Program in District Naukenjerai of Merauke Regency	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal pembangunan desa proyek yang telah dikerjakan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan terjadi monopoli oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan program-program, sehingga partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi masih sangat rendah 2. Pemantauan dan evaluasi masih belum baik, sehingga output dari program yang didanai dengan Dana Desa yang bertujuan untuk 	Penelitian ini mengambil lokus di daerah timur Indonesia, lebih tepatnya di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Dimana daerah ini termasuk daerah dengan otonomi khusus di Indonesia. Dalam penelitian ini faktor penghambat maupun pendorong dalam pengelolaan dana desa tidak dijelaskan atau tidak diteliti.

Pengarang	Artikel/Judul	Temuan	Perbedaan
		<p>memberdayakan masyarakat belum sepenuhnya optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>	
<p>Sukmawati, Fitri, Haizam, Mohd, Saudi, Mohd</p> <p>International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol 6, Issue 5 (2019)</p>	<p>Effects of Utilization of Village Funds on Community Empowerment in Indonesia</p>	<p>Pemanfaatan Dana Desa mempunyai pengaruh yang significant terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah desa transparan dalam pemberian informasi kepada masyarakat terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. sedangkan mengenai pemberdayaan, masyarakat telah mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang program-program pemberdayaan dan ikut terlibat dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan.</p>	<p>Fokus penelitian ini untuk menguji pengaruh penggunaan dana desa pada pemberdayaan masyarakat di Indonesia, variabel dana desa yang digunakan yaitu kejelasan, akuntabel dan transparansi, sedangkan variabel untuk pemberdayaan masyarakat adalah kesadaran, kapasitas dan pengetahuan.</p>
<p>Mujtahid, I.M, Titi Darmi</p> <p>International Journal of scientific and Technology Research, Vol 8, Issue 10 (2019)</p>	<p>Reinforcement The Capacity Of Village Fund Management To Improve The Economy Of Local Communities (Indonesia Example)</p>	<p>Kapasitas lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dalam pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, memiliki rating yang cukup baik karena faktor kekuatan lebih besar daripada faktor kelemahan yang dimiliki dalam pengelolaan Dana Desa, sedangkan</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan sejauh mana kapasitas pengelolaan dana desa untuk meningkatkan perekonomian dalam masyarakat. Sedangkan lokus penelitian ini sebanyak 30 desa yang mempunyai letak geografis dekat dengan ibukota provinsi, karena diasumsikan 30 desa ini akan lebih mudah untuk mengembangkan</p>

Pengarang	Artikel/Judul	Temuan	Perbedaan
		pada lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), ancaman lebih besar daripada peluang dalam pengelolaan Dana Desa. hal ini tercermin dalam posisi SWOT pada penguatan manajemen Dana Desa.	kapasitas kelembagaan dalam membangun desa secara kompetitif
Azlina, Nur, Amir Hasan, Desmiyawati, Iskandar Muda International Journal of Economy Research, Vol 14, No 12 (2017)	The Effectiveness of Village Fund Management (Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Desa yang disalurkan pemerintah ke setiap desa telah sesuai dengan apa yang ada di peraturan, namun ada beberapa kebutuhan desa yang belum dapat tersentuh oleh pembangunan pedesaan. 2. Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah kepada pemerintah desa sedikit mengalami keterlambatan, namun dalam pengembangannya, Dana Desa dapat dilakukan tepat waktu. 3. Semua kegiatan yang didanai dengan menggunakan Dana Desa telah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan dalam penyusunan laporan keuangan desa masih 	Penelitian ini bertujuan untuk menemukan efektifitas pengelolaan dana desa yang diukur melalui indikator-indikator antara lain : sasaran, tepat waktu dan tanggung jawab dari pengelolaan dana desa

Pengarang	Artikel/Judul	Temuan	Perbedaan
		dibantu oleh staf kabupaten belum mampu secara mandiri.	
Rachma, Dian Dewi, Rafael, P.S, Alwan, S.K International Journal of scientific and Technology Research, Vol 8, Issue 08 (2019)	Government Expenditure, Poverty And Income Inequality In Indonesia: New Evidence From Village Funds	Kontribusi Dana Desa, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan desa.	Penelitian ini mengukur dampak dari kontribusi kebijakan pemerintah dalam “membangun Indonesia dari pinggiran” yaitu kontribusi dana desa, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di desa, selain itu mencari efektifitas kebijakan pemerintah dalam penyaluran dana desa untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di desa serta mencari respon kebijakan terhadap kontribusi dana desa untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan pendapatan di desa.

Sumber : Hasil olahan penulis dari berbagai sumber.

Berdasarkan sumber jurnal yang tertera pada penelitian terdahulu, telah menyumbangkan pemikiran terhadap penelitian yang akan dilakukan. Pemberdayaan masyarakat desa memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun faktanya hasil dari pemberdayaan masyarakat tersebut tidak selalu berdampak secara *significant* terhadap kesejahteraan masyarakat. Memang dalam pemberdayaan masyarakat terdapat aktor yang berperan sebagai fasilitator dan penerima manfaat. Namun jika kedua aktor tersebut tidak dapat berkoordinasi dengan baik, sudah barang tentu hasil dari pemberdayaan yang diharapkan tidak dapat terwujud. Perlu adanya kesadaran bagi *stakeholders* dalam bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan bersama-sama.

Dana Desa yang diperuntukkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah sekian dari beberapa kegiatan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa yang didanai dari anggaran tersebut. Sehingga perlu pengelolaan yang baik dan bijak bagi pemerintah desa khususnya dalam mengelola Dana Desa agar tepat guna dan tepat sasaran. Peran serta masyarakat sangat penting ditekankan karena sebagai subyek maupun obyek dalam pemberdayaan harus mengetahui untuk apa anggaran yang diperuntukkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa dapat mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya terutama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi dari banyaknya faktor yang dapat menghambat teralisasinya tujuan dan target dari diberikannya alokasi dana tersebut, terutama dari setiap masalah yang menghambat

pada setiap tahapan dalam pengelolaan Dana Desa. hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu “Menganalisis Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa di Desa Kulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri”. Pengelolaan yang akan diteliti dilihat dari aspek tahapan pemberdayaan masyarakat mulai dari penyadaran, pengkapasitasan dan pendayagunaan.

Dalam menganalisis pemberdayaan manusia, tidak hanya dilihat dari sudut pandang yang sempit melainkan harus mempertimbangkan banyak aspek agar analisis yang dihasilkan dapat menghasilkan informasi yang valid dan teruji kebenarannya. Mengacu pada penelitian terdahulu analisis yang dilakukan dapat dilihat dari sisi individu ataupun kelompok, sosial budaya serta lingkungan. Dari sisi individu atau kelompok diperlukan ketrampilan dan etos kerja yang baik antar *stakeholders*, kemudian diperlukannya partisipasi dan koordinasi yang baik antara fasilitator (pemerintah desa) dengan penerima manfaat (masyarakat) demi terwujudnya penyelenggaraan pemberdayaan yang efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1.5.2. Administrasi Publik

Administrasi Publik sebagai suatu disiplin ilmu, memberikan berbagai prinsip-prinsip, metode, dan teknik yang rasional, yang dapat dipelajari untuk mencapai suatu tujuan. Cara-cara yang digunakan administrasi publik untuk mencapai tujuan memang dinilai dari segi efisiensi dan efektifitas. Terjadi lima pergeseran paradigma administrasi publik menurut Henry (1995:21-49), yakni :

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi yang menjelaskan adanya pemisahan antara politik dan administrasi.
2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi yang diperkenalkan sebagai fokus administrasi publik. Sedangkan lokus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas.
3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik yang menganggap lokusnya adalah birokrasi pemerintahan namun fokusnya menjadi kabur.
4. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi menganggap bahwa fokusnya dalam mengembangka prinsip-prinsip manajemen secara menyeluruh, sedangkan lokusnya sendiri tidak jelas karena fokus dianggap mampu diterapkan di swasta maupun publik.
5. Paradigma Administrasi sebagai Administrasi Publik, paradig tersebut telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradig ini adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

G.Shabbir Cheema (2007) juga mengungkapkan paradigma administrasi publik dalam bentuk empat tahapan yang menggambarkan perkembangan paradigma administrasi publik. Empat paradig tersebut adalah.

1. *Traditional public administration*, yang berorientasi pada hierarki, ketidakberpihakan, profesionalitas dan legal-rational.

2. *Public Management*, yang memusatkan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip manajemen termasuk efisiensi dalam pemakaian sumberdaya, efektifitas, orientasi pada pelanggan, orientasi pada kekuatan pasar dan lebih sensitif terhadap kepentingan publik.
3. *New Public Management*, yang diarahkan pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi dan orientasi pada hasil.
4. *Governance*, paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses dimana para warga masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, memediasi berbagai perbedaan-perbedaannya, dan menjalankan hak dan kewajibannya.

Penjelasan-penjelasan akan perubahan paradigma administrasi public, didalamnya terkandung beberapa elemen penting yang terkait dengan pemerintah dan masyarakat, sehingga fokus administrasi publik, tidak hanya pada pemerintahan akan tetapi juga pada masyarakat secara umum. Berdasarkan penjelasan dari berbagai paradigma administrasi publik secara konseptual, terdapat dua fokus dalam teori administrasi publik yaitu manajemen publik (pengelolaan birokrasi pemerintahan) dan kebijakan publik (pengambilan keputusan). Peneliti memfokuskan pada paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik yang berfokus pada manajemen publik yang berbasis *New Publik Management* yang terkandung prinsip pemberdayaan.

1.5.3. Manajemen

Manajemen sejatinya sulit didefinisikan, tidak ada definisi manajemen yang telah diterima secara universal, adapun definisi mengenai manajemen itu sendiri menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Stoner: Manajemen adalah proses perencanaan , pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- 2) Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Definisi-definisi yang telah dijelaskan memberikan gambaran bahwa, manajer dapat dikatakan berhasil apabila dalam proses pencapaian tujuan, ia mampu mendayagunakan individu dan mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini memfokuskan pada konsep manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

G.R. Terry dalam Handoko (2012: 21-27) yang menyatakan terdapat empat dasar fungsi manajemen antara lain :

- a. *Planning* (Perencanaan), yang merupakan tahap awal yang menjelaskan mengenai rencana-rencana yang dibutuhkan untuk diberikan kepada

organisasi (tujuan-tujuannya) dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

- b. *Organizing* (pengorganisasian), yaitu kegiatan dalam menentukan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dengan penugasan tanggung jawab dan pendelegasian wewenang yang diperlukan bagi setiap individu untuk melaksanakan tugasnya.
- c. *Actuating* (Pengarahan), secara sederhana, adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan.
- d. *Controlling* (Pengawasan), adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah selesai dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan sebuah sistem yang saling terkait satu sama lain dan tidakbisa dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu fungsi dengan fungsi lainnya, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan hingga pengawasan.

metode "*planning programming – budgeting system*" untuk meberikan suatu peralatan analisa *benefits* dan *cost* setiap program atau kegiatan (dalam Tani Handoko, 2012:386). Langkah -langkah penting (PPBS) meliputi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan analisa dan spesifikasi tujuan tujuan dasar dalam setiap kegiatan utama/lingkupan program

- b. Pelaksanaan analisa keluaran setiap program dalam bentuk tujuan-tujuan khusus
- c. Pengukuran biaya total program untuk beberapa tahun di muka
- d. Penentuan alternatif-alternatif yang paling efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan dasar pada biaya terkecil
- e. Pelaksanaan implementasi PPBS dalam bentuk yang sistematis dan teratur sehingga keputusan-keputusan anggaran di waktu yang akan datang menjadi sasaran analisa sejenis berikutnya.

1.5.4. Manajemen Publik

Laurence Lynn dalam Wijaya (2014 : 2) mempertimbangkan tiga kemungkinan tentang gambaran manajemen publik, yaitu sebagai seni (*art*), ilmu (*science*) dan profesi (*profession*). Secara umum, apa yang dimaksud Lynn mengenai manajemen publik sebagai seni adalah aktivitas kreatif yang dilaksanakan oleh para praktisi tidak dapat dipelajari dengan cara “dihitung” artinya manajemen publik merupakan sebuah aktivitas yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan sangat tergantung dari situasi dan kondisi dimana beroperasi.

Manajemen publik sebagai ilmu, berarti manajemen publik memerlukan sebuah analisis sistematis dengan menggunakan interpretasi dan eksplanasi. Sedangkan dengan menyebutnya sebagai profesi, Lynn merujuk kepada sekelompok orang yang mendedikasikan dirinya kepada ilmu manajemen publik.

Empat prinsip dasar bagi administrasi publik yang meliputi bidang manajemen publik Perry dan Kracmer dalam Keenan (2008 :100), terdiri dari:

- 1) Pemerintah sebagai setting utama organisasi
- 2) Fungsi eksekutif sebagai fokus yang utama
- 3) Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi
- 4) Metode perbandingan sebagai metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik.

Teori kelembagaan menurut Frederickson dan Smith dalam Wijaya (2014 : 19) merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma dan harapan yang mengatur seseorang/kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan, sehingga terdapat 2 pilar utama yaitu sistem aturan, regulatif dan budaya, oleh karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang tangguh untuk memperkokoh nilai, aturan dan tujuan dari institusi..

1.5.5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat Mas'ood (Mardikanto, 2017: 26). Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat dalam Totok Mardikanto. (2017: 26) diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Konsep pemberdayaan juga dikemukakan oleh banyak kalangan salah satunya yaitu menurut Osmani (Totok Mardikanto, 2017: 27), mendefinisikan pemberdayaan sebagai *“Empowerment may, socio-politically, be viewed as a condition where powerless people make a situation so that they can exercise their voice in the affairs of governance”* dari pengertian tersebut pemberdayaan juga dapat diterjemahkan secara sosio-politik, dapat dipandang sebagai kondisi di mana orang yang tidak berdaya membuat suatu situasi sehingga mereka dapat menggunakan suara mereka dalam urusan pemerintahan. Dharmawan dalam Mardikanto (2017: 27) mendefinisikan makna pemberdayaan sebagai *“A process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions, and to more easily access to a source of better living”* yang mengandung arti Sebuah proses yang memiliki cukup energi yang memungkinkan orang untuk memperluas kemampuan mereka, memiliki kekuatan tawar yang lebih besar, untuk membuat keputusan mereka sendiri, dan untuk lebih mudah mengakses sumber kehidupan yang lebih baik.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk:

- a) Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- b) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha

pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin dalam Mardikanto, 2017: 27-28).

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi dengan titik fokusnya pada lokalitas, sebab masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal, seperti yang dinyatakan oleh Anthony Bebbington (Mardikanto, 2017: 30) yaitu :

“Empowerment is a process through which those excluded are able to participate more fully in decisions about forms of growth, strategies of development, and distribution of their product”

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan secara garis besar sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Totok Mardikanto (2017: 30) menjelaskan dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

1. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
3. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa ruang lingkup yang diperhatikan harus menurut Ndraha (Nyoman S, 2005: 145) sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Politik, bertujuan meningkatkan *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui *bargaining* tersebut, yang diperintah (masyarakat) mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang dan jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.
2. Pemberdayaan Ekonomi, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, pembayar, resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kambing hitam kegagalan program dan penderitaan kerusakan lingkungan.

3. Pemberdayaan Sosial Budaya, yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*) perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.
4. Pemberdayaan Lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang diperintah dan lingkungannya terdapat hubungan yang saling menguntungkan.

Proses pemberdayaan, didalamnya terdapat beberapa indikator yang dapat diperhatikan demi keberlangsungan proses pemberdayaan tersebut. Wilson dalam Nyoman S (2005: 122-128), memberikan pendapat tentang indikator yang mempengaruhi akibat adanya pemberdayaan dalam organisasi, yang pada intinya adalah :

1. Reputasi, merupakan derajat penilaian organisasi yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dalam pemberdayaan.
2. Fokus Manajemen, upaya cara manajemen yang dilakukan untuk menciptakan keberhasilan pemberdayaan.
3. Manajemen Pemberdayaan, mengacu pada pemahaman dan pengelolaan pemberdayaan oleh para pemimpin/birokrat
4. Atmosfir, merupakan suasana dalam pemberdayaan, apakah dalam pemberdayaan terdapat komitmen, dan semangat atau tidak.
5. Kepemimpinan, meliputi gaya seorang kepemimpinan seorang manajer/birokrat dalam menggerakkan bawahannya demi tercapainya tujuan pemberdayaan.

6. Mengeluarkan kesanggupan manusia, merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong individu menggunakan ketrampilan dan kemampuannya dalam pemberdayaan.
7. Pengakuan dan penghargaan, cenderung kepada penilaian dalam bentuk dukungan dan penghargaan terhadap pemberdayaan yang dilakukan.
8. Inovasi, meliputi kebaruan dalam pemberdayaan untuk mempermudah tercapainya tujuan pemberdayaan.
9. Kepercayaan, mencakup keyakinan dan keterbukaan individu mengambil resiko dalam pemberdayaan
10. *Teamwork*, penggunaan kemampuan secara bersama antar individu satu dengan lainnya dalam bentuk kerjasama untuk keberhasilan pemberdayaan.
11. Pengambilan dan pengendalian keputusan, sikap yang dilakukan baik dari pemimpin maupun yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan mengendalikan pemberdayaan yang dilakukan.
12. Komunikasi, keterbukaan antar individu satu dan individu lainnya dalam menyampaikan informasi.
13. Masyarakat, meliputi penerimaan, kepuasan, dan partisipasi yang dilakukan dalam pemberdayaan.
14. Struktur dan prosedur, mencakup tata cara yang dilakukan untuk mendorong keberhasilan pemberdayaan.
15. Tujuan organisasi, meliputi kontribusi pemberdayaan dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pemberdayaan masyarakat selanjutnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sugiani dalam prosiding seminar ilmiah nasional Kesehatan mengemukakan temuannya terkait factor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari:

1. Tingkat pendidikan, tingkat pendidikan disini berpengaruh terhadap kemampuan atau pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dilingkungannya
2. Akses Informasi, factor ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menemukan, memahami, dan mengkomunikasikan kembali informasi yang didapatkan
3. Kepemimpinan, factor yang berkaitan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengatur prosedur kerja untuk mencapai tujuan.

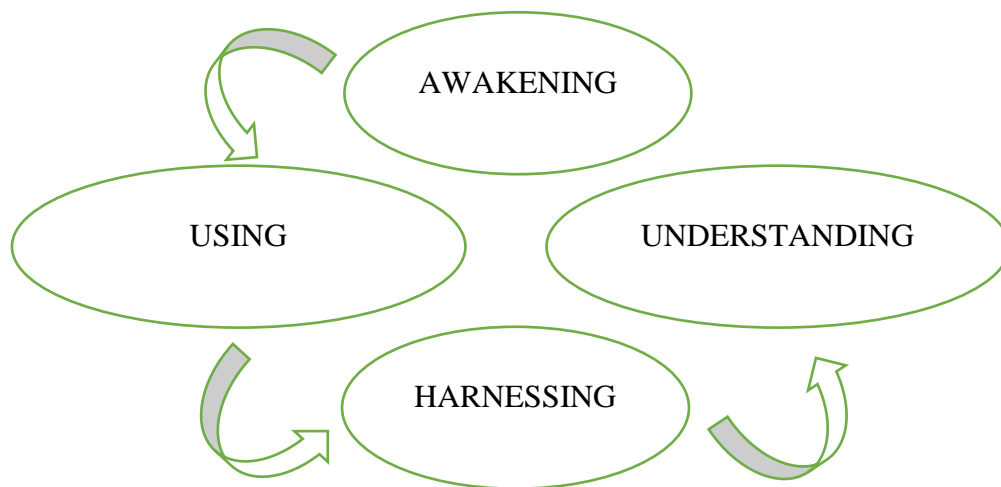
Faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menurut Daraba (2015:167) terdiri dari:

1. Komunikasi, yaitu kemampuan stakeholders dalam menyampaikan informasi yang jelas pada masyarakat
2. Sumber Daya, yaitu kemampuan untuk mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan segala sumber daya yang tersedia.

3. Disposisi yaitu sikap pemimpin atau pendamping didalam masyarakat
4. Struktur birokrasi, factor yang berkaitan dengan kemampuan pelaksana dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugas
5. Tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat atau factor yang berkaitan dengan kemajuan usaha dan kemandirian masyarakat miskin yang mendapat bantuan setelah program pemberdayaan.

Wilson (dalam Nyoman S, 2005:130) menyatakan ada 4 tahapan proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

Gambar 1.2
Empowerment Process menurut Terry Wilson (1996)



Sumber : Nyoman Sumaryadi (2005: 130)

Tahap pertama berawal dari proses pemberdayaan individu adalah *awakening* yang merupakan proses pemberdayaan untuk mendorong individu menerima tantangan pemberdayaan. Tahap kedua dari pemberdayaan adalah *understanding*, yaitu memunculkan pemahaman dan persepsi baru yang sudah mereka dapat mengenai diri mereka sendiri, pekerjaan, aspirasi dan keadaan umum

mereka, sehingga tau apa yang dibutuhkan dalam pemberdayaan dan pemberdayaan seperti apa yang dilakukan. Tahap ketiga dari proses pemberdayaan adalah *harnessing*, dalam tahap ini individu, merupakan tahap individu memutuskan seperti apa menggunakan ketrampilan yang dimiliki dalam pemberdayaan. Tahap terakhir adalah *using* yakni menggunakan ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki dalam pemberdayaan sebagai kebiasaan.

Tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang diungkapkan oleh Randy R. Wrihatmolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007:1001) sebagai berikut :

1. Tahap Penyadaran

Memberikan pemahaman terkait hak untuk menjadi mampu dan memotivasi mereka agar keluar dari kemiskinan, biasanya tahap ini dilakukan dengan pendampingan.

2. Tahap Pengkapasitasan

Memampukan masyarakat yang kurang mampu agar memiliki ketrampilan untuk mengambil peluang yang diberikan dengan melakukan pelatihan – pelatihan, dan kegiatan yang memiliki tujuan meningkatkan *lifeskill*.

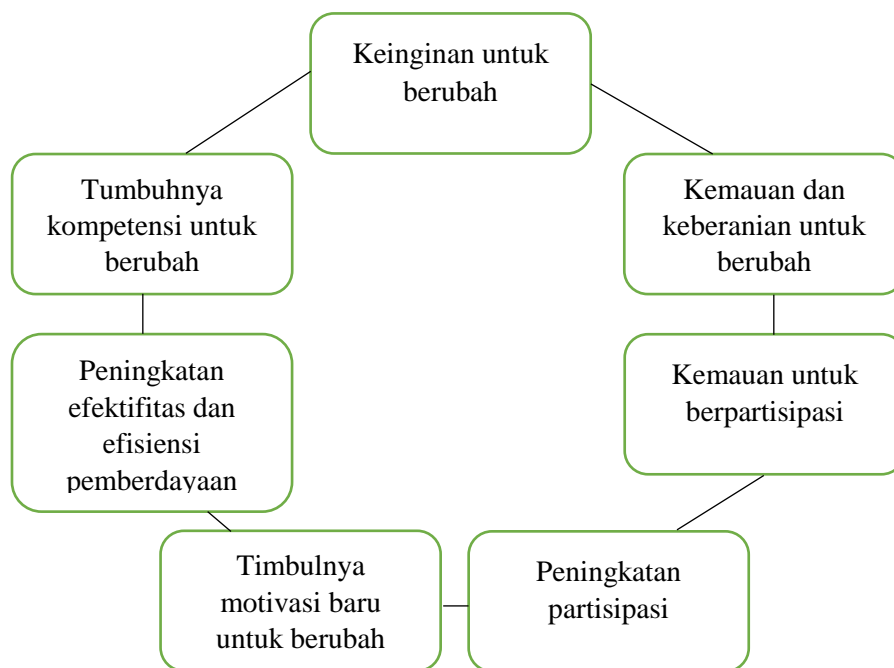
3. Tahap Pendayagunaan

Tahap dimana masyarakat diberi peluang sesuai kemampuan melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat sesuai kapasitas dan

kapabilitas serta akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan pilihan sebelumnya.

Wilson (Mardikanto, 2017: 122-123) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari (Gambar 1.2) :

Gambar 1.3
Siklus Pemberdayaan Masyarakat



Sumber : Totok Mardikanto (2017: 123)

Gambar 1.2, dalam siklus pemberdayaan masyarakat menunjukkan kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi. Proses tersebut terdiri dari 7 tahap, proses tersebut berawal dari menumbuhkan keinginan pada diri

seseorang untuk berubah hingga peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Tahap pertama adalah menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, dilanjut tahap yang kedua yakni menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan, yang ketiga mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan, yang keempat meningkatkan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya, yang keenam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan dan tahap yang terakhir meningkatkan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan konsep pemberdayaan milik Randy R. Wrihatmolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto dimana konsep ini digunakan untuk melihat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Kulurejo dengan menyoroti tahap-tahap yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan faktor yang mungkin mempengaruhinya.

1.5.6. Dana Desa

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan bahwa Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

yangdiperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 dijelaskan Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu Ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus). Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus) dan untuk Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus). Dana Desa diprioritaskan untuk dipergunakan dalam pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:

- a) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- b) Sub Bidang Pertanian dan peternakan
- c) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- d) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- e) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- f) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- g) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Penulis, dalam melihat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Kulurejo, selanjutnya akan menggunakan konsep pemberdayaan milik Sumaryadi (Totok Mardikanto, 2017: 122-123), dimana menurut Sumaryadi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa tahap yang dalam penelitian ini akan dilihat dari:

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa

Pemberdayaan masyarakat sejatinya dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam penelitian ini upaya pemberdayaan masyarakat melalui dana desa akan dilihat dari tahap-tahap pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak desa menggunakan dana desa yang dimiliki, terdiri dari:

1. **Tahap Penyadaran**, tahap penyadaran disini merupakan tahap memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk memahami potensi yang dimiliki melalui sosialisasi atau penyuluhan dimana penulis akan melihat pelaksanaan dan sumber dana dari tahap ini
2. **Tahap Pengkapasitasan**, berkaitan dengan upaya untuk memunculkan potensi dalam masyarakat melalui pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat serta upaya memberdayakan sumber daya yang dimiliki. Tahap ini juga berkaitan dengan peran serta dari masyarakat.

3. **Tahap Pendayagunaan**, tahap yang berkaitan dengan pemberian peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan berkelanjutan dalam mengambil peran lebih dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat

Faktor pendorong dan penghambat dalam penelitian ini selanjutnya akan dilakukan dengan melihat beberapa faktor berikut:

1. Komunikasi, berkaitan dengan cara pemerintah desa mengkomunikasikan seluruh informasi dan penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Sumber Daya, berkaitan dengan sumber daya manusia, potensi yang dimiliki desa dan kondisinya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
3. Disposisi berkaitan dengan sikap pemimpin atau pendamping didalam masyarakat khususnya selama mendampingi masyarakat.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini, adalah model penelitian pendekatan kualitatif, menurut Creswell dalam Herdiansyah (2010: 8) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan

pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.

Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mengedepankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012: 15). Sehingga dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat memberikan penjelasan secara mendalam dan komprehensif atas fenomena sosial yang ada di masyarakat.

Penelitian ini juga memfokuskan pada studi kasus yang berdasarkan pada keunikan dan kekhasan yang ada di Desa Kulurejo yang berbeda dari desa lainnya yang ada di Kabupaten Wonogiri. Desa Kulurejo merupakan desa termiskin di Kecamatan Nguntoronadi, sedangkan pendapatan Dana Desa di Desa Kulurejo juga merupakan yang tertinggi ketiga dari seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Nguntoronadi, selain itu pemberdayaan masyarakat di Desa Kulurejo belum optimal dilaksanakan, dan hanya dua sub kegiatan saja yang dilaksanakan dari ketujuh sub kegiatan yang seharusnya wajib dilaksanakan menurut peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.7.2. Situs Penelitian

Lokus atau tempat pelaksanaan penelitian berada di Desa Kulurejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini diindikasikan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Kulurejo belum sepenuhnya optimal dilaksanakan.

1.7.3. Subjek Penelitian

Informan pada penelitian ini yaitu semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kulurejo, yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Wonogiri
2. Kepala Desa
3. Sekretaris Desa (Koordinator Pengelolaan Dana Desa)
4. Pelaksana teknis pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
5. Bendahara Desa
6. Masyarakat Desa

1.7.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berwujud kata-kata atau pernyataan-pernyataan dan bukan merupakan rangkaian angka atau bersifat numerik.

1.7.5. Sumber Data

Matthew B. Miles (1992: 15), Sumber data dalam penelitian kualitatif dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen,

pira rekaman dan diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian. Data tersebut diperoleh dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan saat penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu:

1) Wawancara

Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2009 :118) wawancara adalah percakapan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan secara formal dan terstruktur dengan pedoman wawancara (*guideline interview*) yang telah dipersiapkan kepada informan terkait pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kulurejo. Digunakan juga alat bantu seperti *tape recorder*, *handycamp* dan buku catatan saat proses wawancara berlangsung.

2) Observasi

Observasi menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2012 :204) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dilakukan secara partisipan dengan pengamatan secara langsung. Artinya dengan observasi partisipan ini, pengamat secara langsung diberikan kesempatan oleh subjek penelitian untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan orang-orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka pengamat akan memperoleh data yang lebih lengkap dari objek penelitian dan memungkinkan juga ditemukannya penemuan baru yang tidak terungkap pada saat wawancara.

3) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data statistik, dokumen perundang-undangan dan data profil perseorangan yang mempunyai peran penting dalam penelitian.

Data tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa

4) Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, dengan menggunakan observasi, wawancara, pengumpulan data sekunder (dokumentasi) secara serempak yang selanjutnya diuji kebenaran/keabsahan dengan uji kredibilitas data.

Pengumpulan data diperoleh dari informan yang ditentukan dengan menggunakan teknik *purposeful sampling*, *snowball sampling*, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Teknik *Purposeful Sampling* merupakan teknik menentukan narasumber berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan, yang meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri, Kepala Desa Margomulyo, Ssekretaris Desa Margomulyo, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Bendahara Desa.

- 2) Teknik *Snowball Sampling* merupakan teknik penelusuran yang bersifat sambung-menyambung hingga sampai kepada sasaran yang hendak diteliti, sesuai dengan arahan dari narasumber yang ditentukan melalui teknik *purposeful*. Dengan menggunakan teknik *snowball* informasi dalam penelitian dapat diperoleh secara lebih dalam dan lebih luas dari yang ditentukan sebelumnya.

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis Data Kualitatif menurut Bogdan dalam Sugiyono (2012: 334) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan untuk memperoleh data yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, mengambil data yang pokok dari yang penting, dan dicari tema dan polanya. Hal ini dilakukan agar data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan dan pencarian data selanjutnya.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif, bagan dan hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah pemahaman terhadap apa yang terjadi dalam merencanakan pekerjaan berdasarkan apa yang telah terjadi.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan cara membuat kesimpulan dari temuan dan hasil penelitian dengan memberikan penjelasan simpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan.

1.7.8. Kualitas Data

Untuk menilai kualitas data yang diperoleh valid dan berkualitas diperlukan teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data, maka dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi, menurut Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2012: 372-374) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga metode dalam menguji kredibilitas data, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan melalui pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, sehingga dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.

Denzin dalam Herdiansyah (2010: 201-202) terdapat empat tipe triangulasi yang diuraikan sebagai berikut:

- a) *Theory triangulation* (triangulasi dalam hal teori), yaitu penggunaan *multiple* teori (lebih dari satu teori utama) atau beberapa perspektif untuk menginterpretasi sejumlah data.

- b) *Methodological triangulation* (triangulasi dalam hal metodologi), yaitu penggunaan multimetode untuk mempelajari topik tunggal/kasus tunggal.
- c) *Data triangulation* (triangulasi dalam hal metode pengumpulan data, yaitu penggunaan lebih dari satu metode pengumpulan data dalam kasus tunggal
- d) *Observer triangulation* (triangulasi dalam hal *observer*), yaitu penggunaan lebih dari satu orang *observer* dalam satu kasus tunggal dalam rangka untuk mendapatkan kesepakatan intersubjektif antar-*observer*.

Pengujian validitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berbeda, tidak hanya mencari sumber informasi yang didapat hanya dengan mewawancarai satu informan saja untuk memperoleh informasi yang benar-benar akurat, selanjutnya data hasil wawancara dianalisis kebenarannya dengan membandingkan kondisi yang ada di lapangan yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung di instansi pemerintah desa Kulurejo.

